

***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(LAKIP) Kecamatan Kute Siantan  
Tahun 2025***

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KECAMATAN KUTE SIANTAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Kute Siantan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kute Siantan selama Tahun 2025. LAKIP berisikan pencapaian kinerja Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Payalaman,       Februari 2026  
CAMAT KUTE SIANTAN,

AZHAR,S.E  
Pembina (IV/a)  
NIP.198205172002121003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	5
1.3. Tujuan Penyusunan.....	8
1.4. Dasar Hukum.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II     PERENCANAAN KERJA</b>	
2.1. Indikator Kinerja Utama .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	17
3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	18
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025.....	26
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Permasalahan.....	35
4.3. Saran/Masukan.....	35
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. IKU Tahun 2025	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
3. Cascading Renstra 2025-2029	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Kelurahan RT dan RW Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 .....	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025.....	4
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Kute Siantan.....	13
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Kec. Kute Siantan Tahun 2025.....	14
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025.....	18
Tabel 3.2.	Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden.....	20
Tabel 3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel 3.4.	Unsur Penilaian indikator persentase swadaya masyarakat.....	25
Tabel 3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1.....	26
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Kecamatan Kute Siantan.....	27
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Perserapan Kecamatan Kute Siantan.....	31
Tabel 3.8.	Efektifitas Anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.9.	Tingkat Efektifitas Penggunaan Anggaran Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025.....	33

## **BABI**

---

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi .

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kute Siantanselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

## **GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUTE SIANTAN**

### Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Kute Siantan terletak antara - 3°04'34"- dan 3°27'30" LU, 106°02'14" - 106°27'58" BT.

Secara Topografi, Kecamatan Kute Siantan terletak pada daerah dataran tinggi, dengan ketinggian 1.853 meter dari permukaan laut dengan rata-rata curah hujan 384,80 mm/bulan dan temperatur 28,5°C - 31,5°C,

Secara administratif Kecamatan Kute Siantan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Cina Selatan;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Palmatak;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Siantan Tengah;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Siantan Utara.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kute Siantan terbagi atas 5 (Lima) Desa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Payalaman
- 2. Payamaram
- 3. Teluk Bayur
- 4. Batu Ampar
- 5. Matak;

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kelurahan, RT dan RW Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025**

No.	Kelurahan	Jumlah	
		RT	RW
1.	Payalaman	10	2
2.	Payamaram	8	4
3.	Teluk Bayur	5	2
4.	Batu Ampar	6	2
5.	Matak	5	2
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>	<b>12</b>

Sumber : Kecamatan dalam angka (BPS)

#### Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Kute Siantan berdasarkan sensus BPS pada tahun 2025 mencapai **3.736** jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki - laki **1.979** jiwa dan jumlah penduduk perempuan **1.757** jiwa.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025**

No	Kelurahan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Payalaman	669	672	1.341
2.	Payamaram	536	387	923
3.	Teluk Bayur	238	214	452
4.	Batu Ampar	294	253	547
5.	Matak	242	231	473
<b>JUMLAH</b>		<b>1.979</b>	<b>1.757</b>	<b>3.736</b>

Sumber : Kecamatan dalam angka (BPS)

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTE SIANTAN

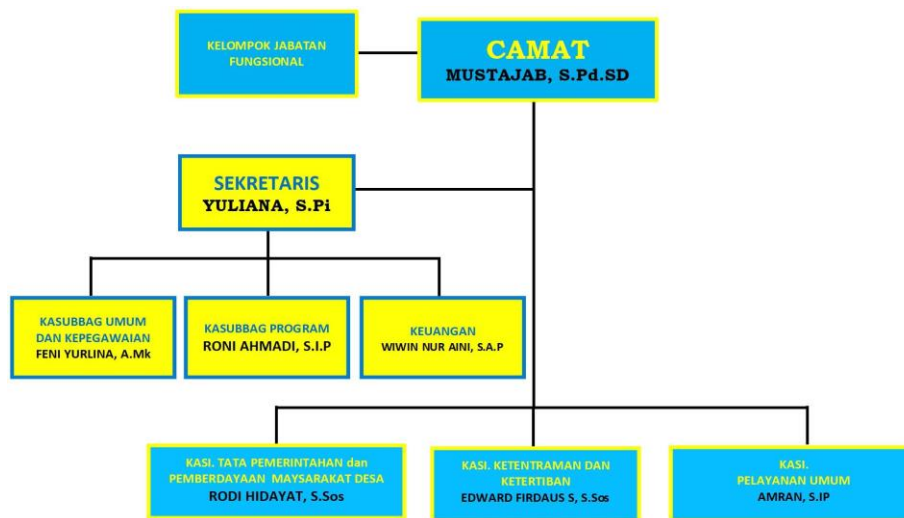
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kute Siantan adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, **Tugas dan Fungsi Kecamatan** adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerahan Peraturan Walikota;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di kecamatan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh WaliKepulauan Anambas untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan disajikan dalam bagan berikut ini :



## ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kute Siantan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kute Siantan pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kepulauan Anambas.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
- 4) Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan;
- 5) Masih banyaknya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di area terlarang;
- 6) Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus terus dijaga dan ditingkatkan;
- 7) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kute Siantan sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Anambas.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kute Siantan, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 3) Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat;
- 4) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 5) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program- program yang masih belum optimal bersama instansi terkait;
- 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

### **1.3. TUJUAN PENYUSUNAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

#### **TUJUAN**

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja kecamatan Kute Siantan tahun 2025 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kute Siantan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

### **1.4 DASAR HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **BABI PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi: Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025**

Pada Bab ini diuraian ringkasan / ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan :

1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Visi Kepulauan Anambas

**“ Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif,  
Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”**

#### **“Energi Baru, Anambas Maju”**

MISI KEPULAUAN ANAMBAS YANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No	Misi Kepulauan Anambas
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2	Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.

#### Tujuan

No	Tujuan Kecamatan
Misi 1,2 :	
1	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Indikator Tujuan

Tujuan Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat					
Nilai Indeks kepuasan masyarakat	83	84	85	86	86

#### Sasaran

No	Sasaran Kecamatan
Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Kecamatan	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan			
1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	✓
1.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	✓
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan			
2.1	Persentase Partisipasi swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan	%	✓
2.2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	%	✓

Target Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	A	A	A
1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85	85	86	86
2.1	Persentase Partisipasi swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan	20	55	56	65	70
2.2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan				70	75

Program Per Sasaran

No	Program
Sasaran 1 :Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Kute Siantan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kute Siantan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kute Siantan

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	
2	Nilai SAKIP	Angka/Point	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persen	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Kute Siantan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	BAIK	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	80,25
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	BAIK	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	80,25
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,77	76,69	76,82	77,45	77,75	77,90	80,00	80,00

### **BAB III**

---

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kepulauan Anambas.

## Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

### Predikat nilai capaian kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2.	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3.	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Kute Siantan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1, terdiri dari 2 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 2 indikator;

### **3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kute Siantan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kute Siantan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kute Siantan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	
2	Nilai SAKIP	Angka/Point	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persen	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kute Siantan pada tahun 2025 sebesar 80,25% atau **bermakna Baik Sekali**

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Kute Siantan pada tahun 2025 mencapai 80,25% atau bermakna Baik Sekali. Jadi secara umum Kecamatan Kute Siantan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kepulauan Anambas.

Berdasarkan revisi Renstra pada Tahun 2024 telah ditetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Kute Siantan dapat disajikan sebagai berikut :

## 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Adapun Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	
2	Nilai SAKIP	Angka/Point	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persen	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	

Pada indikator sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan, terlihat ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 70,45% sedangkan pada tahun 2026 sebesar 75,25% dikategorikan baik.

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan, ada dua indikator yang mendukung yaitu:

### a. Nilai Sakip Kecamatan

Realisasi Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Kute Siantan tahun 2025 yaitu

A , predikat ini sama dengan tahun 2025.

Faktor yang mendorong tercapainya AKIP Kecamatan Kute Siantan, meliputi:

1. Kecamatan Kute Siantan sudah menyajikan informasi pencapaian kinerja secara andal dan memadai untuk setiap sasaran dan indikator kinerja sasaran yang sudah diperjanjikan.
2. Kecamatan Kute Siantan sudah mendokumentasikan hasil reviu pada dokumen perencanaan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Individu. Kinerja individu merupakan prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Sasaran kerja individu terdiri dari sasaran kinerja, indikator kinerja dan target perorangan yang merupakan penjabaran dari sasaran kinerja dan target atasan langsungnya. Setelah melaksanakan kegiatan, dilakukan pengukuran/evaluasi capaian kinerja dengan

membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja setiap sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari kegiatan ini akan diperoleh gambaran keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja individu.

3. Penyusunan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja Kecamatan  
Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Kecamatan tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Kecamatan Kute Siantan.
4. Melakukan perbaikan - perbaikan sebagai evaluasi atas penilaian kinerja, baik dari rumusan penetapan target, sasaran, indikator kinerja, target kinerja, serta analisis pencapaian kinerja secara mendetail pada tiap sasaran kinerja. Adanya evaluasi program secara berkala serta pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sistem Evaluasi Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2024, yang dipaparkan saat rapat koordinasi dan evaluasi. Tujuan rapat ini untuk mengevaluasi kegiatan PPTK setiap triwulan apakah sudah sesuai dengan perencanaan & time scedule yg diajukan serta memudahkan PPTK dan Sub Bagian Keuangan diakhir tahun sehingga pengadministrasian spj tidak tertumpu di tw IV.

## **b. Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai berikut :

- Perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan adminduk yang mengganti pelayanan tatap muka dengan pelayanan menggunakan aplikasi/ *online*, namun belum seluruh jenis pelayanan adminduk bisa terakomodir melalui pelayanan *online* tersebut;
- Adanya keluhan dari warga masyarakat karena ada warga masyarakat yang belum memiliki peralatan pendukung (*smartphone*) untuk menggunakan pelayanan *online* tersebut;
- Tidak adanya pelatihan bagi petugas pelayanan sehubungan penyelenggaraan pelayanan *online* tersebut dari SKPD terkait. Sehingga menyebabkan kesulitan bagi petugas pelayanan dalam memahami dan memberi penjelasan kepada warga dalam penggunaan pelayanan *online*.

Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan oleh Bagian Organisasi Kepulauan Anambas, untuk tahun 2025 Kecamatan Kute Siantan mendapatkan nilai IKM sebesar 70,45 dengan kategori A

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Kute Siantan telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025, dari APBD Kepulauan Anambas Tahun 2025 untuk SKPD Kecamatan Kute Siantan didukung anggaran sebesar 3.546.215.925,- yang dibagi dalam Belanja Operasi yakni sebesar 3.546.215.925,- dan Belanja Modal sebesar Rp 0,-

Pada Belanja Operasi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,42 %. Sedangkan dalam Belanja Modal realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,42%

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Kute Siantan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>16.115.000</b>	<b>16.115.000</b>	<b>100.00</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	3.790.000	3.790.000	100.00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	2.270.000	2.270.000	100.00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	3.090.000	3.090.000	100.00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	2.250.000	2.250.000	100.00

5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	2.570.000	2.570.000	100,00
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.145.000	2.145.000	100,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.850.790.524</b>	<b>2.850.790.524</b>	<b>100,00</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.712.466.334	2.712.466.334	100,00
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	127.789.600	127.789.600	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		10.534.590	10.534.590	100,00
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4.567.244</b>	<b>4.567.244</b>	<b>100,00</b>
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Rp. 4.567.244	Rp. 4.567.244	100,00
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>236.329.052</b>	<b>236.329.052</b>	<b>100,00</b>
1.	Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	31.300.952	Rp. 31.300.952	<b>100,00</b>
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.600.875	6.600.875	<b>100,00</b>
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	75.761.153	75.761.153	<b>100,00</b>
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	25.678.680	25.678.680	<b>100,00</b>
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	12.066.660	12.066.660	100,00
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	100 %	84.920.732	84.920.732	100,00

<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>126.107.681</b>	<b>126.107.681</b>	<b>100.00</b>
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	0	0	100.00
2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	126.107.681	126.107.681	100.00
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>97.063.860</b>	<b>97.063.860</b>	<b>100.00</b>
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	78.895.860	78.895.860	100.00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	18.168.000	18.168.000	100.00
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>386.289.800</b>	<b>378.734.609</b>	<b>100.00</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	8.286.065	8.286.065	100.00
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.630.000	6.630.000	100.00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100 %</b>	<b>42.165.200</b>	<b>42.165.200</b>	<b>100.00</b>
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		42.165.200	42.165.200	100.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		0	0	100.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		42.165.200	42.165.200	100.00

<b>X</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100 %</b>	<b>29.786.500</b>	<b>29.786.500</b>	<b>100.00</b>
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	29.786.500	29.786.500	100.00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		29.786.500	29.786.500	100.00
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100 %</b>	<b>86.136.000</b>	<b>86.136.000</b>	<b>100.00</b>
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	86.136.000	86.136.000	100.00
2.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	80.340.000	80.340.000	100.00
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		5.796.000	5.796.000	100.00
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		27.640.800	27.640.800	<b>100.00</b>
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		27.640.800	27.640.800	100.00
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		5.240.800	5.240.800	100.00
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		22.400.000	22.400.000	100.00

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran**  
**Kecamatan Kute Siantan Tahun 2023**

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Program (Rp)	Realisasi Anggaran Program (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	3.360.487.425	3.360.487.425	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.850.790.524	2.850.790.524	100,00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.786.500	29.786.500	100,00
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.165.200	42.165.200	100,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.136.000	86.136.000	100,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.640.800	27.640.800	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kute Siantan pada tahun 2025. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Kute Siantan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator or Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	<b>Sasaran 1 (2 IK) :</b>			
	Melebihi/melampaui target	-	-	100,00
	Mencapai target	1	100,00	
	Tidak mencapai target	-	-	
2	<b>Sasaran 2 (2 IK) :</b>			
	Melebihi/melampaui target	2	140,86/133,33	100,00
	Mencapai target	-	-	
	Tidak mencapai target	-	-	

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025**

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	94,36	98,32	-3,96
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kecamatan	137,10	98,63	38,47
	<b>Rata-rata</b>	<b>115,73</b>	<b>98,48</b>	<b>17,25</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Kute Siantan dimana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 115,73% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 98,48% sehingga rata-rata efisiensi 17,25%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan 2025

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>1. Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.091.031.746,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.131.942.063,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.173.261.484,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.214.994.099,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.257.144.040,00</b>	
	<b>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>		<b>88%</b>		<b>90%</b>		<b>94%</b>		<b>98%</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Ungkup Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.790.085.305,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.827.051.722,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.864.387.803,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.902.097.245,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.940.183.782,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	3.696.641.705,00	40 Orang/Bulan	3.733.608.122,00	40 Orang/Bulan	3.770.944.203,00	40 Orang/Bulan	3.808.653.645,00	40 Orang/Bulan	3.846.740.182,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	16 Laporan	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan 2025

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	40 Orang	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>94.733.938,09</b>	<b>100%</b>	<b>98.677.838,09</b>	<b>100%</b>	<b>102.661.178,09</b>	<b>100%</b>	<b>106.684.351,09</b>	<b>100%</b>	<b>110.747.755,09</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	4 Laporan	43.636.945,09	4 Laporan	47.580.845,09	4 Laporan	51.564.185,09	4 Laporan	55.587.358,09	4 Laporan	59.650.762,09
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>169.432.487,91</b>	<b>100%</b>	<b>169.432.487,91</b>	<b>100%</b>	<b>169.432.487,91</b>	<b>100%</b>	<b>169.432.487,91</b>	<b>100%</b>	<b>169.432.487,91</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.210.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.210.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.210.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.210.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.210.000,00</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.570.015,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.570.015,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.570.015,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.570.015,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.570.015,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	0 Unit	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan 2025

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	34.112.700,00	100%	37.612.700,00	100%	39.112.700,00	100%	41.612.700,00	100%	43.112.700,00
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	25.112.700,00	100%	27.112.700,00	100%	27.112.700,00	100%	28.112.700,00	100%	28.112.700,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	2 Laporan	25.112.700,00	2 Laporan	27.112.700,00	2 Laporan	27.112.700,00	2 Laporan	28.112.700,00	2 Laporan	28.112.700,00
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	100%	100%	3.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	7.000.000,00
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.500.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	8.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.500.000,00	2 Laporan	7.000.000,00	2 Laporan	7.500.000,00	2 Laporan	8.000.000,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	249.403.096,00	100%	284.903.096,00	100%	314.403.096,00	100%	347.903.096,00	100%	378.403.096,00
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	6.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	9.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	12.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga	2 Laporan	3.500.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.500.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2 Laporan	3.500.000,00	2 Laporan	4.500.000,00	2 Laporan	5.500.000,00	2 Laporan	6.500.000,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	143.403.096,00	100%	168.403.096,00	100%	182.403.096,00	100%	197.403.096,00	100%	213.403.096,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	17.090.000,00	2 Lembaga	19.090.000,00	2 Lembaga	21.090.000,00	2 Lembaga	22.090.000,00	2 Lembaga	23.090.000,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	125.313.096,00	2 Lembaga	145.313.096,00	2 Lembaga	155.313.096,00	2 Lembaga	165.313.096,00	2 Lembaga	175.313.096,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	1.000.000,00	10 Unit	4.000.000,00	10 Unit	6.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	15.000.000,00
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100.000.000,00	100%	109.000.000,00	100%	123.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	153.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	180 Keluarga	85.000.000,00	180 Keluarga	95.000.000,00	180 Keluarga	105.000.000,00	180 Keluarga	115.000.000,00	180 Keluarga	125.000.000,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	80 Keluarga	15.000.000,00	80 Keluarga	14.000.000,00	80 Keluarga	18.000.000,00	80 Keluarga	25.000.000,00	80 Keluarga	28.000.000,00
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	36.018.100,00	100%	41.018.100,00	100%	46.018.100,00	100%	51.018.100,00	100%	56.018.100,00
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	36.018.100,00	100%	41.018.100,00	100%	46.018.100,00	100%	51.018.100,00	100%	56.018.100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2 Laporan	30.018.100,00	2 Laporan	35.018.100,00	2 Laporan	40.018.100,00	2 Laporan	45.018.100,00	2 Laporan	50.018.100,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan 2025

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	105.000.000,00	100%	107.000.000,00	100%	108.411.532,00	100%	125.000.000,00	100%	129.170.246,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	105.000.000,00	100%	107.000.000,00	100%	108.411.532,00	100%	125.000.000,00	100%	129.170.246,00
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	250 Orang	95.000.000,00	250 Orang	97.000.000,00	250 Orang	98.411.532,00	250 Orang	115.000.000,00	250 Orang	119.170.246,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00
	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam</b>											
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	75.466.104,00	100%	80.376.422,00	100%	93.466.104,00	100%	85.965.656,00	100%	94.466.104,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	75.466.104,00	100%	80.376.422,00	100%	93.466.104,00	100%	85.965.656,00	100%	94.466.104,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	16.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.240.800,00	2 Dokumen	6.240.800,00	2 Dokumen	5.240.800,00	2 Dokumen	8.240.800,00	2 Dokumen	5.240.800,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	1 Laporan	42.225.304,00	1 Laporan	46.135.622,00	1 Laporan	42.225.304,00	1 Laporan	49.724.856,00	1 Laporan	42.225.304,00
<b>JUMLAH</b>				<b>4.591.031.746,00</b>		<b>4.682.852.381,00</b>		<b>4.774.673.016,00</b>		<b>4.866.493.651,00</b>		<b>4.958.314.286,00</b>

Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat, untuk menghasilkan kinerja sebesar 94,36%, menggunakan sumber daya keuangan sebesar 98,32 %, sehingga tingkat efisiensi adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan ( $94,36\% - 98,32\% = -3,96\%$ ), dan tingkat efektifitasnya adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan total per sasaran ( $94,36\% : 98,32\% = 95,97\%$ ). Hal ini dinilai tidak efektif karena kinerja yang dihasilkan kurang dari sumber daya Keuangan yang digunakan.

Untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, untuk menghasilkan kinerja sebesar 137,10%, hanya menggunakan sumber daya keuangan sebesar 98,63%, sehingga tingkat efisiensi adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan ( $137,10\% - 98,63\% = 38,47\%$ ), dan tingkat efektifitasnya adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan total per sasaran ( $137,10\% : 98,63\% = 139\%$ ).

Dari data analisis efisiensi dan efektifitas kedua sasaran kinerja Kecamatan Kute Siantan diatas, dapat disimpulkan bahwa Program/kegiatan yang paling efisien dan efektif dalam mencapai sasarannya adalah yang tergabung pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan program sebagai berikut:

- A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- B. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## BAB IV

---

### PENUTUP

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Kecamatan Kute Siantan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025- 2029.

LAKIP Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Kute Siantan selama tahun 2025, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

### KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kute Siantan tahun 2023 dikategorikan **Baik sekali= 115,73 %**, yang terdiri dari 2 sasaran strategis yang mencakup 4 indikator sasaran, sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran :
  - ✓ Capaian sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian; 1 indikator mencapai target = 100% atau bermakna Baik, dan 1 indikator mencapai target = 88,73% atau bermakna Baik, rata-rata capaian indikator sasaran 1 = 94,36% atau **bermakna Baik**.
  - ✓ Capaian sasaran strategis 2, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian; 1 indikator mencapai target = 140,86 % atau bermakna Baik Sekali, dan 1 indikator mencapai target = 133,33% atau bermakna Baik Sekali, rata-rata capaian indikator sasaran 2 = 137,10% atau **bermakna Baik Sekali**.

Berkaitan dengan capaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran strategis yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **115,73 %** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Kecamatan Kute Siantan tahun 2025 adalah **Baik Sekali**.

## **PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Kute Siantan, antara lain :

- a. Terjadinya refocusing anggaran sehingga banyak kegiatan yang batal dilaksanakan
- b. Masih minimnya koordinasi dari masing-masing seksi dalam mengusulkan dan pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Masih ditemukannya kendala/hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan
- d. Keterbatasan aparatur dalam memiliki kemampuan IT

## **SARAN / MASUKAN**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan Kecamatan Lubuk Kilangan, antara lain :

- a. Memaksimalkan pelayanan melalui online dan cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat
- b. Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan yang tertunda tahun 2025 ke tahun 2026
- c. Melakukan koordinasi semua seksi/subbag mulai dari perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
- d. Mencari solusi dalam menyelesaikan kendala/hambatan dalam merealisasikan kegiatan
- e. Mengikutsertakan pengembangan dan peningkatan pengetahuan aparatur untuk mengikuti Diklat/Pelatihan IT

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan itu semua akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ditahun mendatang.

Payalaman, Februari 2026  
CAMAT KUTE SIANTAN,

AZHAR,S.E  
Pembina (IV/a)  
NIP.198205172002121003